

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inisiatif pengembangan inovasi *e-government* di Indonesia telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan sistem yang terintegrasi di antara berbagai instansi, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹ Pemanfaatan teknologi digital diadaptasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* yang membahas perintah bagi seluruh pejabat terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dihadapkan pada keharusan untuk mengembangkan *e-government* secara nasional. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berubah, serta sebagai upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan di era percepatan teknologi informasi dan komunikasi.² Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendefinisikan SPBE sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menurut *World Bank*, *e-Government refers to the use by government agencies of information*

¹ Muhammad Fitri Rahmadana et al., *Pelayanan Publik*, ed. Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2020). Hlm.176

² Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

*technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile omputing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*³ Penerapan layanan *e-government* dan SPBE tidak sekadar mencerminkan transformasi operasional dari sistem manual ke digital dalam lembaga pemerintahan, tetapi juga secara filosofis merepresentasikan perubahan dalam kerja birokrasi yang dinamis. Penerapan layanan *e-government* dan SPBE telah mengubah cara pemerintahan beroperasi dengan memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi dan otomatis, memungkinkan pengelolaan data yang lebih cepat dan akurat. Di samping itu, pemanfaatan IPTEK turut mendorong peningkatan transparansi pemerintahan melalui penyediaan akses informasi publik yang lebih terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat, memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah secara *real-time*, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan dan pengawasan yang lebih mudah diakses.

E-government merupakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai langkah digitalisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan. Inovasi tidak terbatas pada menemukan hal-hal yang belum ada, tetapi juga mencakup upaya memperluas cakupan dan meningkatkan mutu dari hal-hal yang telah ada, sehingga menghasilkan pembaruan yang lebih relevan dan bermanfaat.⁴ Baik pemerintah

³ Richardus Eko Indrajit, *Konsep dan Strategi Electronic Government*, Academia, 2nd ed. (Yogyakarta: ANDI, 2016). Hlm. 4

⁴ Hazid Jalma, Roni Ekha Putera, dan Kusdarini, "E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang," *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019): 24–37.

pusat maupun daerah diharapkan dapat menciptakan inovasi di sektor publik sesuai dengan kerangka yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.⁵ Dewasa ini, tanggung jawab dalam mendorong inovasi penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi terbatas pada pemerintah pusat semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan dapat lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan di berbagai tingkat wilayah.

Seluruh bidang dalam pemerintahan berlomba-lomba melakukan inovasi dalam mendukung implementasi *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi, salah satu inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah berada pada bidang *monitoring* dan evaluasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) diketahui telah mengembangkan sistem dan konsep e-Monev sejak tahun 2010. Dalam upaya reformasi keuangan negara, pemerintah menyadari kebutuhan akan sistem pemantauan anggaran yang lebih modern. Sebelumnya, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai proyek pembangunan dilakukan secara manual, yang sering kali menyebabkan keterlambatan dan membuka peluang terjadinya penyelewengan. Sebagai pengawas dan pengendali pembangunan, maka BAPPENAS menciptakan aplikasi umum bidang perencanaan pembangunan nasional yang berfokus pada fungsi pengendalian pembangunan bernama E-Monev PP 39 untuk pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) secara *real-time* yang didasari oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, undang-undang ini mengatur

⁵ Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara terintegrasi, disertai dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan.⁶ E-Monev mendukung pelaksanaan evaluasi ini dengan menyediakan platform berbasis elektronik.⁷ Pengimplementasian E-Monev bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan cara menyediakan alat evaluasi yang efektif. Menurut Keputusan Menteri PAN RB No. 356 Tahun 2024 bahwa E-Monev merupakan aplikasi yang memiliki peran sebagai alat pengendalian pembangunan nasional berbasis web yang menyediakan data realisasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistem ini terhubung secara terintegrasi dengan platform KRISNA (Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran), yakni sebuah sistem berbasis web yang memuat informasi perencanaan, penganggaran pembangunan, serta kinerja instansi di seluruh jenjang pemerintahan.⁸

Pada tingkat daerah, melalui Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Digital, "E-Monev Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Makin Terbuka, Transparan dan Terintegrasi," *Komdigi*, last modified 2024, diakses November 8, 2024, <https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/e-monev-pengawasan-dan-pengendalian-pembangunan-makin-terbuka-transparan-dan-terintegrasi>. Diakses pada 31 Oktober 2024 pukul 15.20

⁸ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 356 Tahun 2024 Tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 ayat 17 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut dinyatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan perangkat daerah yang bertugas mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.⁹

Sejalan dengan tugas tersebut, beberapa daerah di Indonesia telah melakukan terobosan melalui inovasi serupa yang memberikan berbagai manfaat pula seperti kemudahan dalam memantau capaian kinerja pembangunan secara *real-time*, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan akurasi data yang menjadi dasar evaluasi kebijakan. Diantaranya ada sistem e-monev yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Surabaya sejak tahun 2017. Pada tahap awal penerapannya, sistem ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lonjakan jumlah program yang dikelola, dari 79 program pada tahun 2016 menjadi 102 program pada tahun 2017. Selain itu, terdapat pula kendala akibat kasus penggelapan dana yang melibatkan mantan bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Surabaya pada tahun 2016, yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan sistem tersebut di awal peluncurannya. Namun, sejak tahun 2017, sistem e-monev ini mulai menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Implementasi teknologi ini terbukti mampu mendukung proses *monitoring* dan evaluasi secara efektif, sehingga memberikan hasil yang semakin optimal di tahun-tahun berikutnya. Dengan keberhasilan inovasi ini, sistem e-monev di Kota

⁹ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Surabaya menjadi contoh nyata bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola perencanaan pembangunan.¹⁰ Selain itu, sejak tahun 2017, Kabupaten Bojonegoro juga telah mengimplementasikan sistem aplikasi e-Monev sebagai sarana pendukung dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Aplikasi ini dikembangkan guna meningkatkan kemudahan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja OPD secara lebih sistematis dan efisien. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini masih belum berjalan secara efektif. Salah satu kendala utama adalah penggunaan data yang berbasis per-OPD, bukan data yang diorganisasikan berdasarkan urusan OPD, sehingga diperlukan proses penyesuaian manual sebelum data dapat dilaporkan ke BAPPEDA Provinsi. Selain itu, aplikasi e-Monev ini dinilai kurang *user-friendly*, dengan tata letak fitur yang tidak terstruktur secara jelas, sehingga pengguna sering kesulitan memahami cara pengoperasiannya. Ketidakakuratan data yang dimasukkan kerap terjadi, sehingga laporan yang dihasilkan tidak merefleksikan kondisi aktual. Konsekuensinya, mutu informasi yang diperoleh melalui aplikasi ini belum mencapai tingkat yang optimal. Alih-alih menyederhanakan proses *monitoring* dan evaluasi, aplikasi tersebut justru memperumit pelaksanaannya.¹¹

Penerapan inovasi sistem yang serupa juga dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang, lembaga ini berfungsi sebagai unit pendukung Pemerintah Daerah yang memiliki peran strategis dalam membantu

¹⁰ Mellia Seyselis dan Galih Wahyu Pradana, “Efektivitas Sistem Electronic *Monitoring* Dan Evaluasi (E-Monev) Di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya,” *Publika* 9, no. 1 (2021): 37–48.

¹¹ Muhammad Dwi Maulidin, “Efektivitas Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi Berbasis Aplikasi E-Monev Pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Periode 2017 (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro)” (Universitas Brawijaya, 2017).

Walikota dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pelaksanaan evaluasi dan implementasinya.¹² Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2018, salah satu tugas utama dan fungsi BAPPEDA adalah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah.¹³

Tabel 1. 1
Inovasi BAPPEDA Kota Padang Tahun 2022

No.	Bentuk Inovasi
1.	Sistem Informasi <i>Monitoring</i> Evaluasi Terintegrasi dan Dinamis (SIMETRIS)
2.	Sistem Informasi Aplikasi Pemetaan Kampung Tematik Kota Padang (SIAPKATEKAPE)
3.	Buku Tamu Bappeda dan Survey Kepuasan Masyarakat (Tamu Bappeda Puas)
4.	Bappeda Menilai Kinerja Individu (Bappeda Makin Jadi)
5.	Digital Library Bappeda (Digilib)
6.	Optimalisasi Persiapan Jadwal Kegiatan (OPERJAK) Dalam Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran
7.	Sistem Informasi Persuratan (Siintan)

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Dari Tabel 1.1¹⁴ dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kota Padang tercatat memiliki tujuh buah inovasi dalam upaya melakukan percepatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertugas mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Untuk melaksanakan perencanaan pembangunan,

¹² BAPPEDA Kota Padang, "Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Padang," last modified 2019, <https://bappeda.padang.go.id/tugas-dan-fungsi-bappeda-kota-padang>. Diakses pada 20 November 2024 pukul 10.12

¹³ Peraturan Wali Kota Padang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

¹⁴ Keputusan Wali Kota Padang Nomor 678 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 653 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Padang Tahun 2022.

pemerintah daerah harus memiliki basis data, atau *database*, yang dapat menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan. Keberadaan sistem *monitoring* dan evaluasi yang terintegrasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sebuah kebutuhan. Dengan adanya sistem terpusat ini, seluruh OPD dapat saling terhubung dalam satu platform terpadu untuk mengelola dan memantau capaian serta pelaksanaan pembangunan, baik yang sedang berlangsung maupun yang telah diselesaikan.¹⁵

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Padang didukung oleh 31 perangkat daerah, 10 bagian, dan 11 kecamatan untuk menjalankan tugas serta wewenangnya. Namun, proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) masih menghadapi berbagai kendala, baik di tingkat OPD maupun BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan dan evaluasi. Salah satu kendala yang dihadapi OPD adalah kesulitan dalam melaporkan capaian kinerja karena banyaknya indikator sub-kegiatan yang harus disampaikan. Selain itu, OPD masih harus menginput realisasi anggaran secara manual meskipun data tersebut sudah tersedia dalam sistem SIPKD yang diperbarui setiap triwulan. Di sisi lain, BAPPEDA juga kesulitan dalam menilai hasil capaian kinerja perangkat daerah karena adanya perbedaan satuan target dan indikator yang digunakan di masing-masing sub-kegiatan.¹⁶

Inovasi SIMETRIS merupakan inovasi E-Monev pertama di Sumatera Barat pada bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan yang diciptakan oleh

¹⁵ Seyselis dan Pradana, "Efektivitas Sistem Electronic *Monitoring* Dan Evaluasi (E-Monev) Di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya."

¹⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, "Proposal Inovasi Sistem Informasi *Monitoring* Evaluasi Terintegrasi Dan Dinamis (SIMETRIS) V2," BAPPEDA Kota Padang, 2021.

BAPPEDA Kota Padang terkhususnya yang dikelola oleh bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) sebagai upaya melakukan efisiensi dan percepatan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kerja dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Padang. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS:

“Belum ada daerah lain (di Sumatera Barat) yang membuat inovasi aplikasi seperti ini, kami yang pertama melakukannya ... untuk bidang yang mengelola Inovasi SIMETRIS ini bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) untuk penanggungjawabnya saya sendiri” (Wawancara dengan Bapak Rulli Saputra, SST,M.Si sebagai anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS. Pada tanggal 19 November 2024)

Selain dari BAPPEDA itu sendiri, menurut Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Padang No. 38/SK-Bappeda/2022 tentang Tim Pengelola Inovasi BAPPEDA Tahun 2022 menyatakan bahwa ada beberapa *stakeholder* yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Inovasi SIMETRIS¹⁷, yaitu:

Tabel 1. 2
Stakeholder Inovasi SIMETRIS

No.	Unit Kerja / Perangkat Daerah	Stakeholder
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemerintah
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah
3.	UPI “YPTK” Kota Padang	Akademisi
4.	Valoranews	Media Massa

Sumber: BAPPEDA Kota Padang

¹⁷ BAPPEDA Kota Padang, *Surat Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Padang No. 38/SK-Bappeda/2022 tentang Tim Pengelola Inovasi BAPPEDA Tahun 2022*, 2022.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang berfungsi sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penyedia server bagi Inovasi SIMETRIS selain itu di masa depan nantinya Diskominfo akan berperan sebagai pemelihara akan Inovasi SIMETRIS ini kedepannya, seperti yang diungkapkan oleh kepala bidang *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam kutipan wawancara berikut:

“Diskominfo menyediakan wadah server bagi aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh OPD di Kota Padang termasuk SIMETRIS ... hal ini sudah terintegrasi sejak awal 2023 dan semenjak 2024 untuk *maintenance* kedepannya akan diserahkan ke kominfo, namun admin utamanya tetap di BAPPEDA namun harus memenuhi indikator dokumen seperti keamanannya” (Wawancara dengan Bapak Nur Hakim, S.ST, MT sebagai kepala bidang *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Pada tanggal 16 Desember 2024)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk data terkait capaian penggunaan anggaran yang terintegrasi dengan SIMETRIS. Selanjutnya, UPI “YPTK” Kota Padang sebagai instansi yang menjadi latar belakang daripada tenaga ahli yang mengembangkan Inovasi SIMETRIS, hal ini seperti yang diungkapkan oleh anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang:

“kita dalam membangun aplikasi menggunakan tenaga ahli, kebetulan tenaga ahli ini merupakan salah satu tenaga pengajar di UPI YPTK dulu pada saat kita masih membuatnya ... Kerjasama hanya dilakukan ke personal tenaga ahli tersebut dan bukan ke perguruan tingginya, karna kami merasa bermanfaat dengan keterlibatan mereka, makanya kami masukkan” (Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 16 Desember 2024)

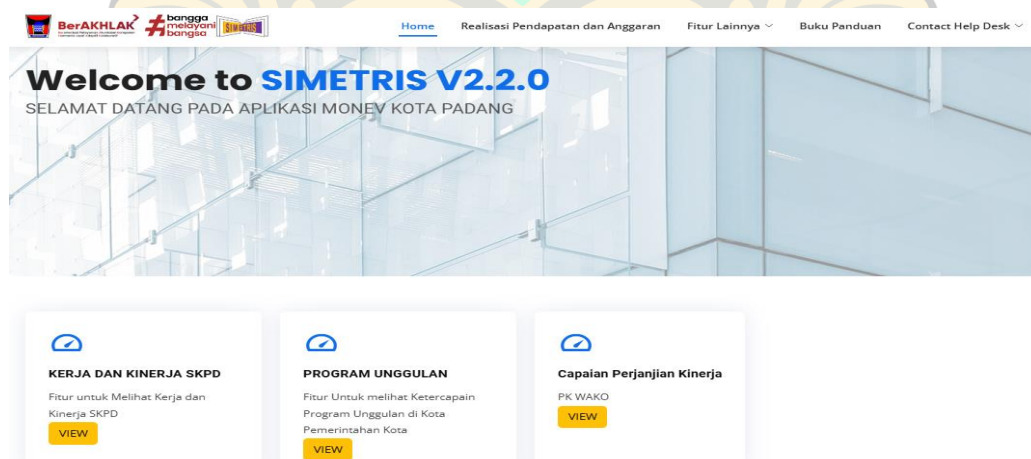
Sedangkan Valoranews untuk bidang publikasi kepada media massa terkait penyebarluasan Inovasi SIMETRIS, seperti yang diungkapkan oleh anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang:

“Valoranews ini sebagai media yang mempublikasikan dan menyebarluaskan mengenai inovasi ini” (Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 16 Desember 2024)

Inovasi ini pertama kali dirancang pada Juni 2021 dan mulai diimplementasikan pada Agustus 2021. Dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web, layanan ini dapat diakses secara publik melalui situs web: <http://simetris.padang.go.id/>. Aksesibilitasnya didukung oleh berbagai jenis peramban seperti Safari, Firefox, Google Chrome, Opera Mini, dan lainnya, baik melalui perangkat smartphone maupun komputer. Dengan demikian, asalkan terhubung ke internet, pengguna tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan untuk memanfaatkan layanan tersebut.

Gambar 1. 1

Tampilan awal Inovasi SIMETRIS



Sumber: <http://simetris.padang.go.id/>

Berikut hasil wawancara peneliti dengan anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS:

“Kita ingin membuat inovasi untuk bisa mendeteksi lebih rinci laporan sesuai perangkat daerah, bisa per minggu maupun per hari, jadi kita bisa kontak misalnya minta tolong dilaporkan evaluasi suatu kegiatan dan bisa langsung diinput di sistem ... karena kalau perbulan itu terlalu lambat untuk melakukan evaluasi karena lingkupnya besar” (Wawancara dengan Bapak Rulli Saputra, SST,M.Si sebagai anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS. Pada tanggal 19 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa kehadiran aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah pemantauan dari kegiatan yang dilakukan oleh OPD di Kota Padang karena penginputannya dapat dilakukan setiap hari sehingga dapat dipantau secara *real-time*. Sebelum digunakannya Inovasi SIMETRIS, semua pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh OPD Kota Padang dilaporkan secara manual setiap per triwulan sekali. Seperti yang diungkapkan oleh anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS melalui kutipan wawancara berikut:

“Sebelumnya kita menggunakan tabel E.81 bentuknya terlalu panjang dan ribet juga kalau dilihat menggunakan tabel panjang, sekarang kita tuangkan dalam sistem agar mudah dilihat, bisa dilihat dalam *smartphone*, selain itu karena diinput per triwulan bisa saja jika ada masalah kita baru tahu tiga bulan kemudian, kalau dengan sistem ini bisa dipantau perhari langsung dan tahu apa yang menjadi masalah, kenapa kok belum melaksanakan kegiatan ... sebelumnya jika manual kadang ada keterlambatan (penginputan kinerja) tapi sekarang karena pakai sistem insya Allah aman karena langsung diinput dan dipantau sehingga di *crosscheck* terus.” (Wawancara dengan Bapak Rulli Saputra, SST,M.Si sebagai anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS. Pada tanggal 19 November 2024)

Dari kutipan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa pelaksanaan evaluasi sebelum menggunakan Inovasi SIMETRIS dilakukan secara manual menggunakan kertas yang berisi Tabel E.81 dan dilaporkan per triwulan sekali sehingga sulit mendeteksi jika ada masalah dalam pelaksanaan kegiatan, ataupun pemantauan pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan tepat waktu. Hal inilah yang mendorong keinginan BAPPEDA Kota Padang untuk menciptakan inovasi dalam evaluasi dan *monitoring* berbasis *online*, sehingga dapat memudahkan OPD dalam penginputan laporannya langsung ke sistem tanpa harus menyerahkan tabel E.81 ke kantor BAPPEDA Kota Padang, selanjutnya BAPPEDA dapat memantau langsung capaian kerja dan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Padang. Melalui Inovasi SIMETRIS, setiap OPD bisa menginput hasil kerja dan kinerja yang telah mereka lakukan kapanpun di website khusus administrator dan secara otomatis terintegrasi langsung dengan *database* yang sudah ada, selanjutnya pihak BAPPEDA akan melakukan penarikan data agar penginputan yang dilakukan OPD dapat sinkron dalam *website* SIMETRIS.

Tabel 1. 3
Menu yang terdapat pada Inovasi SIMETRIS

No.	Menu Utama	No.	Menu Tambahan
1.	Kerja	1.	Program Unggulan
		2.	Perjanjian Kinerja Wali Kota
2.	Kinerja	3.	Tugas Khusus
		4.	Paket Tender
3.	Anggaran	5.	Laporan Perjalanan Dinas
		6.	Publikasi

Sumber: <http://simetris.padang.go.id/>

Inovasi SIMETRIS memiliki tiga menu utama, yaitu kerja dan kinerja yang berisi tingkat capaian dari masing-masing OPD dalam bentuk persentase yang dibagi setiap triwulan dan terdapat indikator warna untuk menilai dua menu tersebut. Indikator warna tersebut antara lain; warna merah sangat rendah, warna kuning rendah, warna abu-abu sedang, warna biru tinggi, dan warna hijau sangat tinggi.

Gambar 1. 2
Interval Penilaian Kinerja Per Triwulan

No.	Interval TW I	Interval TW II	Interval TW III	Interval TW IV	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	
1	$> 22,5$	$> 45,5$	$> 68,25$	$90 \leq 100$	Sangat tinggi	
2	$18,75 > x \leq 22,5$	$38 > x \leq 45,5$	$57 > x \leq 68,25$	$75 \leq 90$	Tinggi	
3	$16,25 > x \leq 18,75$	$33 > x \leq 38$	$49,5 > x \leq 57$	$65 \leq 75$	Sedang	
4	$12,5 > x \leq 16,25$	$22,5 > x \leq 33$	$37,5 > x \leq 49,5$	$50 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 12,5$	$\leq 22,5$	$\leq 37,5$	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Dokumen Inovasi SIMETRIS

Gambar di atas merupakan interval penilaian kinerja per triwulan yang digunakan dalam penilaian kerja dan penilaian kinerja di Inovasi SIMETRIS yang

diadaptasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dibagi menjadi empat triwulan.

Gambar 1. 3
Tabel T-E.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Selanjutnya, pada penilaian menu kerja terkhusus bagi dinas yang melakukan program kerja berbasis lapangan dilakukan penilaian dengan pendekatan yang berbeda, yaitu kegiatan yang berupa pengadaan barang/jasa dan kegiatan swakelola. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS melalui kutipan wawancara berikut:

“Jadi SIMETRIS ada menu kinerja dan kerja, hal ini kami lakukan untuk melindungi dinas-dinas yang memang kerjanya dilapangan, contohnya seperti dinas PUPR, karna cara pelaporan dan penilaian kinerja mereka itu berbeda, sehingga kami buat menu ‘kerja’ ini dengan berlandaskan perwako nomor 47 tahun 2016 untuk membedakan kinerja dinas yang kerjanya di lapangan dengan dinas-dinas lainnya” (Wawancara dengan Bapak Rulli Saputra, SST,M.Si sebagai anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS. Pada tanggal 19 November 2024)

Gambar 1. 4
Pengukuran Realisasi Fisik Kegiatan

A. Kegiatan yang Berupa Pengadaan Barang/Jasa

1. Konstruksi

No	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	15 %	
	- Perencanaan Jadwal	1,5 %	1,5 %
	- Persiapan Surat	1,5 %	3,0 %
	Menyurat	4,5 %	7,5 %
	- RAB/TOR/KAK/ROK/SK	7,5 %	15,0 %
B	Pelaksanaan	80 %	
	- Proses Pengadaan	Nilai presentase pelaksanaan kegiatan dikalikan dengan bobot (80 %)	15 % - 95 %
C	Penyelesaian Serah Terima	5 %	100 %

2. Pengadaan Barang / Jasa Lainnya

No	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	15 %	15 %
	- Perencanaan Jadwal	1,5 %	1,5 %
	- Persiapan Surat	1,5 %	3,0 %
	Menyurat	4,5 %	7,5 %
	- RAB/TOR/KAK/ROK/SK	7,5 %	15,0 %
B	Pelaksanaan	10 %	25 %
	- Penyediaan Barang		
C	Penyelesaian Serah Terima	75 %	100 %

3. Konsultasi dan Jasa Lainnya

No	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	15 %	
	- Perencanaan Jadwal	1,5 %	1,5 %
	- Persiapan Surat	1,5 %	3,0 %
	Menyurat	4,5 %	7,5 %
	- RAB/TOR/KAK/ROK/SK	7,5 %	15,0 %
B	Pelaksanaan	80 %	
	- Laporan Awal	20 %	35 %
	- Laporan Tengah	20 %	55 %
	- Draft Akhir	20 %	75 %
	- Laporan Akhir	20 %	95 %
C	Penyelesaian Serah Terima	5 %	100 %

B. Kegiatan Swakelola

No	Tahapan	Bobot	Akumulasi
A	Persiapan	20 %	
	- Perencanaan Jadwal	5 %	5 %
	- Persiapan Surat	5 %	10 %
	Menyurat	10 %	20 %
B	Pelaksanaan	70 %	
	- Pengadaan Peralatan Terkait Kegiatan (ATK dll)	20 %	40 %
	- Pelaksanaan (Pengumpulan Data, Penyusunan Draft, Pelaksanaan Acara, dll)	50 %	90 %
C	Penyelesaian	10 %	
	- Laporan Akhir		

Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan wawancara dan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian yang digunakan untuk menu kerja disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yaitu di bagi menjadi tahapan, bobot, dan akumulasi.¹⁸ Sedangkan pada menu anggaran berisi dua data keuangan yang diintegrasikan langsung dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pertama, pendapatan daerah (APBD) dengan indikator target, realisasi, dan persentase serta diagram lingkaran dalam bentuk persen untuk

¹⁸ Peraturan Walikota Padang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

realisasi pendapatan dan sisa target pendapatan. Kedua, realisasi belanja OPD (ABD) dengan indikator pagu, realisasi, dan persentase serta diagram lingkaran dalam bentuk persen untuk realisasi belanja dan sisa pagu belum realisasi. Selain itu, Inovasi SIMETRIS juga terdapat enam menu tambahan, yaitu program unggulan, perjanjian kinerja Wali Kota, tugas khusus, paket tender, laporan perjalanan dinas, dan publikasi.

Gambar 1. 5
Tampilan Capaian Kinerja dan Kerja di Website SIMETRIS



NO	SKPD	Kinerja TW 1	Ket. Kinerja	Kerja TW 1	Ket. Kerja
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.57	Sangat Rendah	24.35	Sangat Tinggi
2	DINAS KESEHATAN	20.67	Tinggi	26.87	Sangat Tinggi
3	RSUD Dr. RASIDIN	21.49	Tinggi	25.2	Sangat Tinggi
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.18	Sangat Rendah	13.31	Rendah
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.7	Sangat Rendah	20.51	Tinggi
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.97	Sangat Tinggi	41.09	Sangat Tinggi
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.3	Sedang	25.55	Sangat Tinggi
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	12.32	Sangat Rendah	26.95	Sangat Tinggi
9	DINAS SOSIAL	21.03	Tinggi	21.41	Tinggi
10	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	18.74	Sedang	22.53	Sangat Tinggi
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	18.17	Sedang	27.69	Sangat Tinggi
12	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	23.18	Sangat Tinggi	23.69	Sangat Tinggi
13	DINAS PERTANAHAN	8.52	Sangat Rendah	20.83	Tinggi
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	22.49	Tinggi	23.37	Sangat Tinggi
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23.94	Sangat Tinggi	29.2	Sangat Tinggi
16	DINAS PERHUBUNGAN	18.28	Sedang	20.78	Tinggi
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.87	Sedang	15.9	Rendah

Sumber: <http://simetris.padang.go.id/>

Gambar di atas memperlihatkan tampilan inovasi yang dikembangkan oleh BAPPEDA Kota Padang dalam menilai capaian kinerja dan pelaksanaan kerja yang dibagi per triwulan, disertai dengan indikator warna yang dapat diakses melalui laman website SIMETRIS.

Berikut adalah data jumlah seluruh OPD yang terintegrasi pada Inovasi SIMETRIS:

Tabel 1. 4
Organisasi Perangkat Daerah yang terintegrasi SIMETRIS

No.	Nama Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	RSUD Dr. Rasidin
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Pemadam Kebakaran
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Perikanan dan Pangan
13.	Dinas Pertanahan
14.	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.	Dinas Perhubungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Pariwisata
23.	Dinas Pertanian
24.	Dinas Perdagangan
25.	Inspektorat
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29.	Badan Pendapatan Daerah
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

32.	Bagian Tata Pemerintahan
33.	Bagian Kesejahteraan Rakyat
34.	Bagian Hukum
35.	Bagian Kerjasama
36.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
37.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
38.	Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan
39.	Bagian Organisasi
40.	Bagian Umum
41.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
42.	Kecamatan Padang Barat
43.	Kecamatan Padang Timur
44.	Kecamatan Padang Utara
45.	Kecamatan Padang Selatan
46.	Kecamatan Nanggalo
47.	Kecamatan Kuranji
48.	Kecamatan Lubuk Begalung
49.	Kecamatan Lubuk Kilangan
50.	Kecamatan Pauh
51.	Kecamatan Koto Tengah
52.	Kecamatan Bungus Teluk Kabung

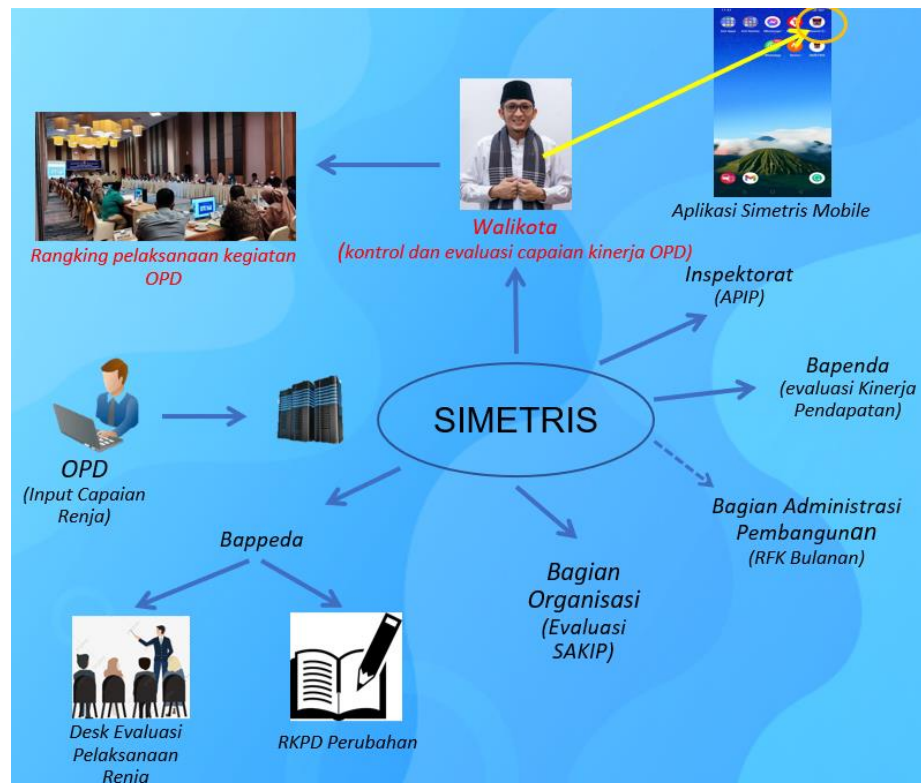
Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Dari tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa BAPPEDA Kota Padang sudah melakukan kolaborasi dengan 52 OPD yang kini telah terintegrasi dengan SIMETRIS untuk mengupayakan kemudahan dalam pemantauan pelaksanaan kerja.¹⁹ SIMETRIS dirancang untuk membantu OPD dalam menginput hasil kerja dan kinerjanya serta menilai capaian kinerja yang memungkinkan pengambil kebijakan daerah untuk membuat keputusan lebih cepat. Selain ditujukan untuk pelaporan kinerja OPD dan evaluasi oleh BAPPEDA, peneliti menemukan adanya

¹⁹ BAPPEDA Kota Padang, 18 Januari 2023 “Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi SIMETRIS,” BAPPEDA Kota Padang, <https://bappeda.padang.go.id/optimalisasi-pemanfaatan-dan-pengembangan-aplikasi-simetris> diakses pada 3 November 2024 pukul 10.40.

pengguna dan penerima manfaat lainnya dari Inovasi SIMETRIS. Hal tersebut peneliti temui dalam dokumen Inovasi SIMETRIS.

Gambar 1. 6
Sasaran Inovasi SIMETRIS



Sumber: Dokumen SIMETRIS.

Dari gambar 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa Inovasi SIMETRIS juga ditujukan untuk Walikota, Inspektorat, BAPENDA, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, dan Bagian Organisasi Setda. Hal ini dijelaskan oleh anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS melalui kutipan wawancara berikut:

“Dapat dilihat disini ada beberapa penerima manfaat lainnya ... dulu itu (sebelum ada Inovasi SIMETRIS) tidak kita lihatkan ke walikota karena bentuknya panjang dan berlembar-lembar untuk

52 perangkat daerah jadinya tidak terlihat, sekarang walikota bisa mengontrol dan mengevaluasi masing-masing kinerja OPD secara real time *online* dari *smartphone* dan juga mengetahui peringkat OPD dalam pelaksanaan kegiatannya ... tampilan untuk wali kota sama seperti di web SIMETRIS, artinya masyarakat juga bisa ikut memantau pelaksanaan kegiatan dari OPD. Kalau untuk Inspektorat supaya memudahkan dalam pengawasan APIP, BAPENDA untuk evaluasi kinerja pendapatan, bagian adm pembangunan itu untuk laporan realisasi fisik dan keuangan, bagian organisasi untuk evaluasi sakiip” (Wawancara dengan Bapak Rulli Saputra, SST,M.Si sebagai anggota bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) BAPPEDA Kota Padang sekaligus penanggung jawab Inovasi SIMETRIS. Pada tanggal 19 November 2024)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka diketahui bahwa Inovasi SIMETRIS ini juga dapat dipantau secara langsung oleh wali kota dan masyarakat. Berkat manfaatnya tersebut, SIMETRIS menerima penghargaan terbaik III pada Lomba Inovasi yang diadakan oleh Wali Kota pada tahun 2022. Dimana lomba ini diadakan oleh Wali Kota Padang untuk mendorong peningkatan kinerja, inovasi, dan kreativitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padang, setiap OPD di Pemerintah Kota Padang diharapkan terus berinovasi demi optimalisasi kinerja yang berkelanjutan.²⁰ Proses penilaian terhadap inovasi daerah dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang No. 30 Tahun 2019 Pasal 14. Dalam pelaksanaan lomba inovasi tahun 2022, pihak-pihak yang berperan aktif dalam proses penilaian antara lain adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), akademisi dari Universitas Andalas (UNAND), serta para

²⁰ Diskominfo, 29 September 2022 “Tingkatkan Kinerja Lewat Lomba Inovasi Wako Hendri Septa: Mari Berinovasi Untuk Kemajuan Kota Padang!,” padang.go.id, <https://www.padang.go.id/tingkatkan-kinerja-lewat-lomba-inovasi-wako-hendri-septa-mari-berinovasi-untuk-kemajuan-kota-padang>. diakses pada 26 November 2024 pukul 13.21

peneliti, analis kebijakan, dan pejabat tinggi yang memiliki kompetensi dalam mengevaluasi inovasi daerah berdasarkan pendekatan ilmiah dan kebijakan publik.

Untuk mengukur keberhasilan dan kelayakan suatu inovasi, digunakan sejumlah kriteria yang merujuk pada Pasal 7 Peraturan Wali Kota Padang No. 60 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang No. 30 Tahun 2019. Kriteria tersebut mencakup aspek kebaruan atau orisinalitas gagasan, kemanfaatan terhadap masyarakat atau organisasi, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya dengan urusan pemerintahan daerah. Di samping itu, inovasi juga harus memiliki potensi untuk direplikasi, yaitu dapat diadaptasi atau diterapkan oleh unit kerja lain atau oleh daerah lain dengan karakteristik serupa.

“SIMETRIS ini tinggi penilaiannya di poin kebaruannya karena memang belum ada yang membuat inovasi seperti SIMETRIS”
(Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 7 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut, diketahui bahwa SIMETRIS memiliki keunggulan dalam aspek kebaruan, karena hingga saat ini belum ada daerah lain di Sumatera Barat yang mengembangkan inovasi serupa. Sistem ini menjadi terobosan dalam digitalisasi pelaporan kinerja perangkat daerah, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Keberadaan inovasi Inovasi SIMETRIS yang diprakarsai oleh BAPPEDA Kota Padang ini merupakan bukti bahwa adanya tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya melakukan efisiensi dan percepatan dalam pemantauan dan evaluasi terhadap kerja dan kinerja OPD yang ada di Kota Padang. Inovasi merupakan

gagasan kreatif yang berhasil diterapkan untuk mengatasi permasalahan publik yang mendesak. Inovasi dapat diartikan sebagai proses menciptakan dan menerapkan cara baru dalam mencapai suatu tujuan atau melaksanakan tugas. Inovasi dapat berupa penggabungan elemen baru, kombinasi baru dari elemen yang sudah ada, atau perubahan signifikan dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu.²¹ Menurut oleh Anthony Arundel, Carter Bloch dan Berry Ferguson proses inovasi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu peran tata kelola dalam membentuk inovasi, sumber ide, budaya inovasi dalam organisasi, ketersediaan kemampuan dan alat pendukung, serta tujuan, hasil, pendorong, hambatan, dan pengumpulan data untuk inovasi tunggal.²² Dalam hal ini, inovasi SIMETRIS ini berdasarkan kolaborasi dan pemikiran kolektif dari anggota BAPPEDA Kota Padang. Hal ini dijelaskan oleh anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melalui kutipan wawancara berikut:

“Saat merancang Aplikasi SIMETRI itu merupakan buah pemikiran bersama dalam rapat internal BAPPEDA, memang ide pertama itu diprakarsai Kabid P2EP yang lama, dan kita melanjutkan sehingga tidak hanya kabid nya saja yang merumuskan akan tetapi didukung oleh kepala BAPPEDA dan staff lainnya ...” (Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 09 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola berperan dalam pengembangan inovasi SIMETRIS, sekaligus menandai

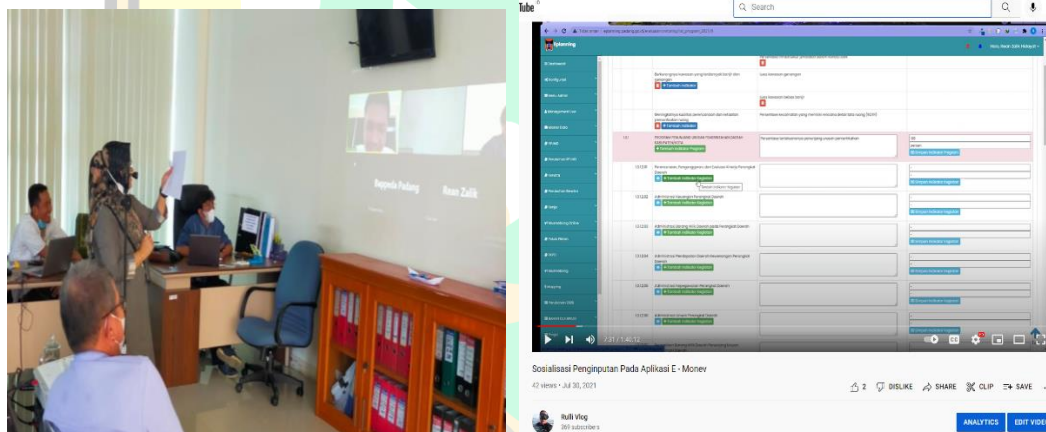
²¹ United Nation Department of Economic and Social, *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works*, United Nations (New York: United Nations, 2006). Hlm. 5

²² Anthony Arundel, Carter Bloch, dan Barry Ferguson, “Advancing innovation in the public sector : Aligning innovation measurement with policy goals,” *Research Policy* 48, no. 3 (2018): 1–10, <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001>.

munculnya sumber inovasi yang menjadi dasar penciptaan aplikasi tersebut. Pemimpin harus mampu memotivasi anggotanya untuk membuat tindakan nyata yang mampu mengarahkan perubahan dengan fokus mencapai hasil yang lebih baik. Kepemimpinan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi. Dapat disimpulkan juga bahwa dalam proses perumusan inovasi SIMETRIS, Kepala BAPPEDA Kota Padang menunjukkan sikap terbuka terhadap diskusi dan masukan dari anggota lainnya.

Dalam mendukung inovasi ini, BAPPEDA Kota Padang berkolaborasi dengan 52 OPD lainnya di Kota Padang untuk ikut berkontribusi.

Gambar 1. 7
Sosialisasi Inovasi SIMETRIS



Sumber: Dokumen SIMETRIS

Berdasarkan gambar di atas, BAPPEDA Kota Padang melakukan sosialisasi kepada OPD yang ada di Kota Padang melalui *Zoom Meeting* pada bulan Juli 2021. Hal ini menunjukkan cara BAPPEDA untuk menjalin kerja sama dengan OPD lain yang ada di Kota Padang sebagai upaya bersama untuk memastikan pelaksanaan inovasi nantinya berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata dalam

bidang *monitoring* dan evaluasi. Hal ini sejalan dengan kutipan wawancara antara peneliti dan anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang):

“Kita butuh kerja sama dengan OPD lainnya, karna OPD ini menjadi pelapor dalam aplikasi ini, sehingga inovasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada yang melapor (pengguna)” (Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 09 Desember 2024)

Selain itu, kolaborasi ini mendorong adanya usulan untuk mengembangkan inovasi SIMETRIS sebagai alat bantu dalam bidang *monitoring* dan evaluasi yang sejalan dengan wawancara antara peneliti dan anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang):

“... Inovasi SIMETRIS ini akan selalu dikembangkan, karena kita sudah ada, jadi tinggal menyempurnakan... selain itu juga kita selalu melakukan BIMTEK ke BAPPEDA sebagai evaluator dan OPD yang ada di Kota Padang sebagai pelapor” (Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 09 Desember 2024)

Tujuan dari diadakannya inovasi SIMETRIS ini adalah harapan akan efisiensi terhadap pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Dengan adanya aplikasi ini, OPD dapat melaporkan setiap kegiatan dalam rencana kerja secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun, tanpa harus menunggu pelaporan manual menggunakan Tabel E.81 yang dilakukan setiap triwulan. Hal ini bertujuan untuk mencegah keterlambatan dalam pelaporan. Bagi pihak yang bertanggung jawab atas *monitoring* dan evaluasi, dalam hal ini BAPPEDA Kota Padang, aplikasi ini memungkinkan pemantauan secara *real-time* tanpa harus menunggu laporan triwulanan. Dengan aplikasi ini, masalah dapat terdeteksi lebih cepat, dan ketidaksesuaian dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Selain itu, untuk

memastikan efektivitas inovasi SIMETRIS dalam evaluasi dan pelaporan kinerja, BAPPEDA sebagai evaluator dan OPD sebagai pelaksana atau pelapor secara rutin mendapatkan bimbingan teknis (BIMTEK). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam penggunaan aplikasi agar dapat mendukung proses perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih efisien dan akurat di Kota Padang. Hal ini juga diperkuat melalui penyelenggaraan acara Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi SIMETRIS, yang melibatkan berbagai OPD di Kota Padang.²³ Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala BAPPEDA Kota Padang pada kutipan wawancara berikut:

“melalui acara ini diharapkan OPD terkait memberikan sumbang saran terkait fitur pengembangan simetris dan integrasi satu data menuju pengembangan e-government di tingkat Kota Padang secara maksimal” (Wawancara Ibu Yenni Yuliza, S.T, M.T sebagai Kepala BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 17 Januari 2023 dalam <https://bappeda.padang.go.id/optimalisasi-pemanfaatan-dan-pengembangan-aplikasi-simetris>)

Keberhasilan implementasi inovasi SIMETRIS telah menarik perhatian berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) melalui kutipan wawancara berikut:

“Banyak yang datang ke kita untuk mereplikasi Inovasi SIMETRIS ini, seperti Solok, Solok Selatan, dan Sawahlunto. Masih dalam lingkup Sumatera Barat” (Wawancara dengan Ibu Dewi Pratika Sari, S.Kom, M.Cio sebagai anggota bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BAPPEDA Kota Padang. Pada tanggal 09 Desember 2024).

Melihat efektivitas dan manfaat yang dihasilkan, sejumlah pemerintah daerah lainnya datang ke BAPPEDA Kota Padang untuk mempelajari sistem tersebut.

²³ BAPPEDA Kota Padang, “Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi SIMETRIS.” diakses pada 3 November 2024 pukul 10.40.

Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mereplikasi inovasi SIMETRIS dan menerapkannya dalam pengelolaan perencanaan dan evaluasi kinerja di daerah mereka masing-masing.

Berdasarkan uraian data yang sudah peneliti paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa inovasi SIMETRIS yang dikembangkan oleh BAPPEDA Kota Padang, memiliki nilai penting yang signifikan. Sebagai sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis *online* pertama di Sumatera Barat, SIMETRIS telah menunjukkan keunggulan dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi pemantauan serta evaluasi kinerja OPD. Pengakuan atas keberhasilannya, seperti mendapatkan penghargaan Terbaik III (Juara 3) dalam Lomba Inovasi yang diadakan oleh Wali Kota Padang tahun 2022, memperkuat relevansi SIMETRIS sebagai model inovasi pemerintahan yang sukses.

Maka peneliti tertarik untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan inovasi SIMETRIS dengan judul penelitian “**Analisis Faktor-Faktor Inovasi SIMETRIS oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.**” Peneliti mengidentifikasi potensi bahwa inovasi SIMETRIS dapat memberikan wawasan strategis bagi daerah lain di Sumatera Barat. Selain itu, peneliti ingin melihat kesiapan BAPPEDA Kota Padang untuk melakukan difusi inovasi sehingga adopsi inovasi serupa serta mendukung pengembangan sistem tata kelola yang lebih efisien dan transparan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor inovasi dalam mendukung pelaksanaan Analisis Faktor-Faktor Inovasi SIMETRIS oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor inovasi dalam mendukung pelaksanaan Analisis Faktor-Faktor Inovasi SIMETRIS oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mahasiswa Departemen Administrasi Publik, serta memberikan pengetahuan umum tentang analisis faktor-faktor inovasi SIMETRIS oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi penulis, khususnya dalam menganalisis faktor-faktor inovasi SIMETRIS oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi daerah lainnya untuk melakukan inovasi serupa.